

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Jangan Beri Fasilitas Lebih ke Auditor BPK
Entitas / Cakupan	: Provinsi Jawa Barat
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat/Hal.2
Edisi	: Sabtu, 9 Desember 2017

Jangan Beri Fasilitas Lebih ke Auditor BPK

BANDUNG, (PR). -

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI meminta agar bupati ataupun wali kota tidak memberikan fasilitas lebih kepada pemeriksa atau auditor BPK Jawa Barat. Pasalnya, dengan memberikan fasilitas lebih akan memengaruhi kinerja dan memberikan peluang korupsi dan kolusi.

"Kami sedang melakukan pembenahan terhadap petugas pemeriksa di lapangan jadi diharapkan tidak ada lagi petugas kami yang bermain atas pemberian predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) terhadap pemda," ujar Kepala BPK RI Jawa Barat, Arman Syifa dalam *media workshop* Laporan Perumusan Opini atas Laporan Pemerintah Daerah di Kantor BPK Jalan Moh Toha Bandung, Jumat (8/12/2017).

Menurut Arman, pada saat auditor berkunjung ke pemerintah daerah, terkadang bupati atau wali kota memberi pelayanan lebih, baik makanan, hotel, transportasi, maupun lainnya. Padahal, tak boleh memberikan fasilitas seperti itu karena semuanya sudah dipenuhi BPK. "Memang terkadang tidak diminta tahu-tahu sudah diberikan hotelnya, transportnya, dan lain-lain. Padahal auditor kami tidak minta," katanya.

Dari fasilitas-fasilitas itulah, menurut Arman, lama-lama tergoда sehingga terkadang dalam pemeriksaan tidak objektif. "*Lamun teras didedet-dedet mah* (kalau terus-terusan diberi paksa) yang tadinya tidak mau jadi mau. Dari itulah diharapkan tidak melakukannya," ujarnya.

Terkait isu jual beli predikat WTP, Arman Syifa tidak memungkiri adanya oknum di BPK. Namun, selama ini belum ditemukan adanya oknum pegawai yang jual beli predikat WTP. Arman mengklaim saat ini pihaknya telah melakukan pengawasan kode etik yang ketat terhadap para auditor. "Mungkin ada celah, tapi sekarang ini setiap pemeriksaan terikat kode etik. Bahkan untuk menjaga objektivitas di atasnya ada majelis kehormatan kode etik," ujarnya.

Arman menjelaskan, ada 28 pemda yang diperiksa dan dari jumlah itu 25 predikat WTP, sisanya 3 WDP yakni Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Subang. Namun menurut Arman WTP bukan tujuan akhir, tapi merupakan kewajiban untuk memperbaiki dan menciptakan akuntabilitas. "WTP itu bukan berarti bebas korupsi. WTP juga rawan politisasi," katanya. **(Yedi Supriadi) *****